

Kontrak Kerja Sama
ANTARA
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
SMA ISLAM ISHLAHUL UMMAH

NOMOR : KKA.350/B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR : 422.1/001/SMAI-IU/VIII/2025

TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL
(KKA) BAGI GURU DI
SMA ISLAM ISHLAHUL UMMAH

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (06-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec.
Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUJANTO, S. Pd., Gr
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat: Dusun Paoak Rempek Desa
Ganggalang. Gangga-KLU

Bertindak untuk dan atas nama SMA ISLAM ISHLAHUL UMMAH, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan Sma Islam Ishlahul Ummah. Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (Pelatihan KKA) bagi Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- | | | | |
|---|------|------|-------|
| (1) Kontrak Kerja | | | |
| ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi | PARA | Sama | PIHAK |
| dalam mengelola dana Pelatihan KKA bagi Guru; | | | |
| (2) Tujuan | | | |
| ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan | | Sama | dana |
| dalam penyelenggaraan Pelatihan KKA bagi Guru. | | | |

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan KKA bagi Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerjasama adalah pengelolaan dan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran sebanyak 1 (satu) orang guru.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBPFungsional Pelatihan KKA bagi Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanjabahan, honor output kegiatan dan belanjajasa profesisebagai pembentuk tarif PNBPFungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
 - b. menyusun RAB pembiayaan dan luarkomponen PNBPFungsional atas layanan PNBP bagi Guru yang meliputi antara lain belanjakonsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan

- panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
- c. membuka rekening penerimaan PNBPFungsional dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBPFungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPFungsional dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
 - f. menyelenggarakan Pelatihan KKAbagi Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan dan
menyampaikan kuitansi dan diterima pembayaran biaya Pelatihan KKAbagi Guru kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKAbagi
Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
 - i. Mengadministrasikan dan
menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKAbagi Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan KKAbagi Guru yang meliputi tarif PNBPFungsional dan biaya di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional sesuai kontrak kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBPFungsional dan Komponen di luar PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan KKAbagi Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
- d. menerima kuitansi dan diterima pembayaran biaya Pelatihan KKAbagi
Guru dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKAbagi
Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKAbagiGuru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBPN yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya Pelatihan KKAbagiGuru sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.841.900. (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus rupiah)/orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBPN Fungsional sebesar Rp1.457.450/orang
 - b. Biaya di luar komponen PNBPN Fungsional atas layanan PNBPN sebesar Rp. 1.384.450/orang
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b belum termasuk komposisi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (4) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan KKAbagiGuru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp.2.841.900. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBPN Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.457.450
 - b. Biaya di luar komponen PNBPN Fungsional atas layanan PNBPN sebesar Rp. 1.384.450

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan KKAbagiGuru dengan mekanisme PNBPN fungsional dan komponen di luar PNBPN fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : Terlampir pada sistem
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBPN Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling lambat hari ke-3 (tiga) saat IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikannya ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7 Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9 Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan adalah hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIHAK KEDUA
SMA ISLAM ISHLAHUL UMMAH

Kepa Sekolah

PPK
Jalan Gajahmada No 173 Jempong
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870

Surel:
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Jalan Lingkar Paok Rempek
RT.003/RW.00.Dusun
Paok Rempek. Genggelang. Gangga. KL
U.

No Telp. 085253714459
Surel : mufidghajali0@gmail.com

Pasal 13 Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah pesertasarasan yang akan mengikuti Pelatihan KKA.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan KKA berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNBPFungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14 Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Lombok Utara,
06 Agustus 2025

PIHAK KESATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NIP198606172014041003

